

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga Kesehatan merupakan kelompok yang paling berjasa di garda depan dalam pemeriksaan dan perawatan pasien terduga maupun terkonfirmasi positif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Merujuk pada definisi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan [1].

Sejak awal pandemi, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk memberikan perlindungan dalam bentuk insentif kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pada kasus *Covid-19*. Ini tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI No.HK. 01. 07/ Menkes/2539/2020 yang menyatakan bahwa segenap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien *Covid-19* berhak mendapatkan dana insentif dan jika meninggal berhak mendapatkan santunan kematian[1].

Sayangnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut hanyalah untuk tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan khusus *Covid-19* saja. Sementara tenaga kesehatan yang tidak melayani pasien *Covid-19* tidak mendapatkan insentif. Padahal semua tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan juga rentan terpapar *Covid-19*, sehingga berhak mendapatkan insentif.

Apalagi di saat penularan tinggi yang memicu meningkatnya kebutuhan pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit seperti sekarang ini. Banyaknya jumlah pasien yang membutuhkan perawatan tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil bagi seluruh tenaga kesehatan. Hal ini diperparah dengan ketiadaan data yang terintegrasi dari tingkat faskes, pemerintah daerah hingga kementerian.

Selain itu, pada KMK RI no. HK. 01. 07/ Menkes/ 2539/2020 terdapat beberapa kejanggalan. Salah satu di antaranya adalah adanya beberapa Rumah Sakit yang mendapatkan privilege lebih, di mana tenaga kesehatan yang bekerja di ruang High Care Unit (HCU), Intensive Care Unit (ICU), dan Intensive Cardiology Care Unit (ICCU) Covid-19, serta ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat inap, instalasi farmasi dan ruang lain untuk pelayanan *Covid-19* mendapatkan insentif. Sedangkan untuk RS lain, hanya tenaga kesehatan yang bekerja di beberapa ruang HCU/ICU/ ICCU Covid-19 dan ruang IGD *Triase* yang mendapatkan insentif, sedangkan, tenaga kesehatan yang bekerja di ruang rawat inap tidak mendapat insentif. Bagaimanapun juga bayang-bayang risiko terpapar *Covid-19* dialami oleh seluruh tenaga kesehatan, termasuk mereka yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama[2].

Data tim Pusara Digital Lapor *Covid-19* hingga 05 Februari 2021 menunjukkan terdapat setidaknya 704 kasus kematian tenaga kesehatan akibat *Covid-19*. Namun, hanya 197 Ahli Waris/Keluarga² tenaga kesehatan yang mendapatkan santunan kematian. Artinya, tidak lebih dari setengah jumlah tenaga kesehatan yang meninggal, Keluarga/Ahli Warisnya belum mendapatkan santunan kematian. Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan hampir Rp 800 triliun untuk dana pengendalian *Covid-19*. Karenanya, Lapor *Covid-19, Indonesia Corruption Watch* (ICW) bersama dengan organisasi profesi kesehatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (*PATELKI*) mengumpulkan data tenaga kesehatan terkait distribusi dana insentif bagi para tenaga kesehatan dan santunan bagi tenaga kesehatan yang telah gugur[2].

Kami menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan mengedarkan formulir pendataan secara daring kepada tenaga kesehatan di mana mengidentifikasi informasi insentif dan santunan tenaga kesehatan. Tim dari ICW melakukan monitoring terhadap penggunaan dana pengendalian pandemi yang sudah dianggarkan. Sehingga upaya pemberian dana insentif maupun santunan segera diberikan kepada para tenaga Kesehatan. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Aspek APBN menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran insentif nakes bukan disebabkan oleh masalah ketersediaan anggaran, namun karena Menteri

Kesehatan mengubah skema pembayaran insentif langsung kepada nakes sehingga terjadi keterlambatan akibat inventarisasi data. Dimana pembayaran langsung ditujukan kepada rekening pribadi masing-masing nakes bukan lagi melalui rekening instansi dan sistem penginputan besaran dan identitas nakes melalui aplikasi inacovid, selain itu untuk fasilitas penanganan Covid-19 yang kepemilikannya oleh daerah anggaran insentif nakes disediakan oleh pemerintah daerah setempat[3].

Berdasarkan analisis diatas, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF TENAGA MEDIS (PENANGANAN *COVID 19*) MENGGUNAKAN ALGORITMA *K-MEANS CLUSTERING* PADA TAHUN 2019 - 2020 DI PUSKESMAS PADANG BULAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah ditemukan , maka rumusan masalah yang Terdapat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara mencairkan dana insentif untuk tenaga penanganan *covid-19* ?
2. Mengapa tenaga penanganan *covid 19* mendapatkan dana insentif ?
3. Menggunakan algoritma *K-Means clustering* ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Pada penelitian ini menggunakan algoritma *K-Means* dalam pembuatan model
2. Penelitian ini hanya membahas tentang pemberian insentif tenaga penanganan *covid-19*
3. Dataset yang dipakai dalam penelitian berasal dari data set

1.4 Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dana insentif yg diberikan kepada tenaga penanganan *covid -19* , pemberian insentif bagi tenaga kesehatan (*nakes*) merupakan bentuk motivasi bagi *nakes* dalam menanganai pandemic *covid-19*.

Manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tujuan diberikan nya dana insentif untuk tenaga penanganan *covid-19*

2. Membuka wawasan tentang dana insentif yang diberikan kepada tenaga penanganan *covid- 19* maupun dana insentif santunan bagi tenaga Kesehatan yang meninggal karena terkena *covid-19*
3. Mengetahui kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif bagi tim kesehatan yang berjuang melawan virus corona agar bermanfaat bagi tim kesehatan dan masyarakat luas

1.5 Teknik Pengumpulan Data

1. *Obervasi* (Pengamatan) adalah kegiatan melihat dan mengamati objek penelitian untuk mengetahui pengaruh, perkembangan, dampak, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, observasi dilakukan bisa dengan beragam cara. Mulai dari pengamatan pada objek langsung, observasi dengan terjun langsung
2. *Kuesioner*(Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup
3. Interview(Wawancara) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.
4. *Document* (Dokumen) surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai buktiketerangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut :

BAB 1 :PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi, metodologi, dan sistematika penulisan laporan yang terkait dengan pembangunan sistem informasi ini.

BAB 2 :LANDASAN TEORI

Bab ini akan berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pemecahan masalah.

BAB 3 :ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan cara implementasi dan penggunaan sistem serta pengujian terhadap sistem informasi yang telah dibuat.

BAB 4 :IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini akan berisi penjelasan tentang cara bagaimana pengimplementasian dan penggunaan sistem, serta bagaimana pengujian terhadap sistem informasi yang telah dibuat.

BAB 5 :KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisi kesimpulan mengenai sistem informasi yang telah dibuat beserta saran-saran yang bermanfaat untuk pengembangan sistem informasi lebih lanjut.